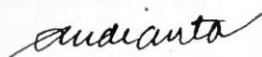


**FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis (SS 1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif					
Indikator Kinerja (IK 1)	Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional.	80%	85%	90%	95%	100%
Indikator Kinerja (IK 1.1)	Persentase Capaian Target Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) yang didukung oleh Kemenko Polhukam	58%	67%	77%	88%	100%
Indikator Kinerja (IK 1.2)	Persentase Capaian Target Industri pertahanan yang didukung oleh Kemenko Polhukam	40%	43%	45%	48%	50%
Indikator Kinerja (IK 2)	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara Dalam Dokumen Perencanaan Nasional	80%	85%	90%	95%	100%
Indikator Kinerja (IK 3)	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
Sasaran Strategis (SS 2)	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal					
Indikator Kinerja (IK 2.1)	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	A
Indikator Kinerja (IK 2.2)	Nilai PMPRB	19	20	21	21	21
Indikator Kinerja (IK 2.3)	Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4
Indikator Kinerja (IK 2.4)	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	80	85	85	90

Jakarta, Januari 2020
Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara



Rudianto

**FORMULIR MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA**

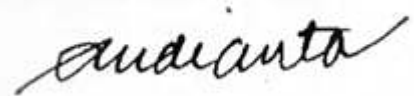
Definisi Sasaran Strategis (SS 1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif adalah penyelenggaraan sinergitas kebijakan bidang pertahanan negara melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas sektoral dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk penyelesaian debottlenecking kebijakan bidang pertahanan negara
Definisi Indikator Kinerja (IK 1)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.1)	Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi
Sumber Data (IK 1.1)	Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan
Cara Menghitung (IK 1.1)	<p><i>Persentase Capaian MEF</i></p> $\Sigma = \frac{\text{Capaian MEF}}{\text{Target MEF pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja (IK 1.2)	Industri pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/ atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari <i>global supply chain</i>
Sumber Data (IK 1.2)	Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan
Cara Menghitung (IK 1.2)	<p><i>Persentase Capaian Industri Pertahanan</i></p> $\Sigma = \frac{\text{Capaian Industri Pertahanan}}{\text{Target Industri Pertahanan pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$
Definisi Indikator Kinerja (IK 2)	Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara Dalam Dokumen Perencanaan Nasional adalah Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional

Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputusan Bidkoor Hanneg yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional
Cara Menghitung	$\sum = \mu$ persentase capaian rekomendasi kebijakan bidang hanneg sesuai dokumen perencanaan nasional
Definisi Indikator Kinerja (IK 3)	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti adalah Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan <i>follow up</i> atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait
Sumber Data	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputusan Bidkoor Hanneg yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
Cara Menghitung	$\sum = \mu$ persentase capaian rekomendasi kebijakan bidang hanneg yang ditindaklanjuti
Definisi Sasaran Strategis (SS 2)	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain dalam rangka pemenuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada unit organisasi, serta untuk mewujudkan tata kelola unit organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel
Definisi Indikator Kinerja (IK 2.1)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
Sumber Data (IK 2.1)	Hasil Penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam
Cara Menghitung (2.1)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kategori Penilaian : 1. AA (>90-100) 2. A (>80-90) 3. BB (>70-80) 4. B (>60-70) 5. CC (>50-60) 6. C (>30-50) 7. D (0-30)

Definisi Indikator Kinerja (IK 2.2)	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu : 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi 4. Penataan Tatalaksana 5. Penguatan Pengawasan 6. Penatan Sistem Manajemen SDM 7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sumber Data (IK 2.2)	Laporan Penilaian Mandiri dari masing-masing kedeputian
Cara Menghitung (IK 2.2)	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilai 0 – 23,5
Definisi Indikator Kinerja (IK 2.3)	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi adalah merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan
Sumber Data (IK 2.3)	Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja
Cara Menghitung (IK 2.3)	Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu *50 poin untuk unsur perencanaan *50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan
Definisi Indikator Kinerja (IK 2.4)	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi yaitu Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen
Sumber Data (IK 2.4)	Penilaian berdasarkan Lembar Kerja Elektronik
Cara Menghitung (IK 2.4)	$\sum = \frac{\text{Indeks pada pelayanan progrev} + \text{Indeks pada PelayananTUM}}{2}$

Jakarta, Januari 2020

Deputi Bidkooor
Pertahanan Negara



Rudianto